

HIDDEN POWER DALAM POLITIK PEMEKARAN DI NUSA TENGGARA TIMUR

Welhelmina Selfina Beli

Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

Welhelminaselfina@gmail.com

Abstract

Proliferation of regions phenomenon can be likened to a "mushroom" which thrives everywhere, from the years 1999 until 2013 have been formed so many New Autonomous Region, but the presence of New Autonomous Region is not an answer to the problems faced by the community. Monopoly power and political and economic interests are always the basis for the formation of new regions. The research with the title "hidden power in the expansion of political power in East Nusa Tenggara" will analyze about the political forces hidden in the politics of division that occurred in East Nusa Tenggara. The method used in this research is descriptive qualitative. The focus of this research is on the proliferation of Pantar Region of East Nusa Tenggara province. The analysis relied on data of primary and secondary data obtained through document analysis and in-depth interviews. Results from this research is indicate that the interests of the local elite politic are more dominant in terms of struggling power by selling the Splitting issue of Pantar region. The hidden power that comes from a group of individuals who support the division by taking advantage of the process. In addition there is the ethnic element in the expansion process, because it appears that the inception of the committee is dominated by a particular ethnic division.

***Keywords: Political regional expansion, hidden power, proliferation of
region in East Nusa Tenggara***

Abstrak

Fenomena pemekaran dapat diibaratkan seperti ”jamur” yang tumbuh subur dimana-mana, dari tahun 1999-2013 telah terbentuk begitu banyak Daerah Otonomi Baru (DOB), namun keberadaan DOB tersebut tidak menjadi jawaban atas penderitaan yang dihadapi oleh masyarakat. Monopoli kekuasaan dan kepentingan politik serta ekonomi yang selalu menjadi dasar terbentuknya DOB. Penelitian dengan judul *hidden power* dalam politik pemekaran di Nusa Tenggara Timur akan menganalisis tentang kekuatan-kekuatan politik yang tersembunyi dalam politik pemekaran yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini lebih bersifat deskriptif kualitatif. Fokus penelitiannya pada pemekaran Kabupaten Pantar Provinsi Nusa Tenggara Timur. Analisis yang dilakukan mengandalkan data primer maupun data sekunder yang diperoleh melalui telaah dokumen serta wawancara mendalam. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepentingan para elite politik lokal lebih dominan dalam hal memperebutkan kekuasaan dengan menjual isu pemekaran Kabupaten Pantar. Kekuasaan yang tersembunyi tersebut berasal dari kelompok individu yang mendukung pemekaran dengan mengambil keuntungan dari proses tersebut. Selain itu ada unsur etnis dalam proses pemekaran, karena terlihat bahwa terbentuknya panitia pemekaran didominasi oleh etnis tertentu.

Kata-kata kunci : Politik Pemekaran, *hidden power*, *Pemekaran di Nusa Tenggara Timur*

A. Pendahuluan

Dengan bergulirnya otonomi daerah, setiap daerah di Indonesia berlomba-lomba untuk melakukan pemekaran daerah, pemekaran tidak hanya terjadi pada tingkat provinsi tetapi terjadi juga ditingkat kabupaten/kota bahkan kecamatan. Fenomena pemekaran dapat diibaratkan seperti "jamur" yang tumbuh subur dimana-mana. Tidak salah jika setiap daerah berlomba-lomba untuk memekarkan wilayahnya karena secara aturan hukum ada Undang-undang telah memberikan ruang untuk melakukan pemekaran tersebut. Seringkali yang menjadi permasalahannya adalah jika tujuan pemekaran diikuti oleh kepentingan politik para elite baik di tingkat lokal maupun pusat. Kekuasaan yang tersembunyi yang dimainkan oleh beberapa orang sangat dapat mempengaruhi dalam proses pemekaran dengan pemetaan elite politik yang tidak tampak dipermukaan namun menjadi pemain utama dalam proses pemekaran.

Berdasarkan penelitian dari I Ngurah Suryawan tentang *Komin Tipu Komin: Elit Lokal dalam Dinamika Otonomi Khusus* menjelaskan bahwa Selama penelitian singkat di Manokwari, ternyata peranan elit lokal dengan dukungan marga atau suku sangat kental sekali. Fenomena ini menjadi implikasi yang serius dari kemunculan elit-elit lokal yang merasa paling berhak atas posisi-posisi di birokrasi dan menikmati sumber daya alam di daerah mereka. Sentimen masyarakat dengan suku dan marga ini berdampak kepada kecurigaan kepada masyarakat lainnya. Jika seorang elite lokal memegang posisi penting di pemerintahan, hampir bisa dipastikan isi sebagian besar staf departemen tersebut adalah saudara dari marganya (Suryawan dkk, 2014). Politik pemekaran memang selalu diikuti oleh kepentingan dengan memasukan etnis tertentu yang kemudian melakukan monopoli kekuasaan ditingkat lokal.

Salah satu hasil penelitian Roth bahwa pemekaran daerah di Luwu Raya menggambarkan bahwa kekuasaan politik dan ekonomi serta kontrol terhadap sumber-sumber strategis bercampur aduk dengan beragam persepsi yang berbeda tentang sejarah dan identitas, yang digariskan atas afiliasi keagamaan atau tradisi-

tradisi adat-istiadat dan hubungan-hubungan sosial lainnya. Kemudian pemekaran Tojara Raya lebih mengacu pada ambisi politik yang muncul dalam konteks perubahan yang berkaitan dengan masa penjajahan, revolusi, dan dekolonisasi, Darul Islam, suratnya kerajaan Luwu dan penetapan batas-batas administratif yang berakhir sampai tahun 1990-an Henk, dkk (2007) Tentu saja pemekaran di daerah ini kemudian mengandung konflik-konflik dan ketegangan-ketegangan di antara kelompok yang berkepentingan.

Jika melihat beberapa hasil penelitian di atas, tergambar jelas bahwa politik pemekaran selalau didominasi oleh kekuasaan-kekuasaan politik tertentu, baik yang kelihatan maupun tidak kelihatan. Kekuasaan yang tersembunyi bagi Gaventa, merupakan kekuasaan yang digunakan untuk kepentingan pribadi. Kekuasaan ini muncul dalam rangka mempertahankan kekuasaan dan *privilege* dari kepentingan-kepentingan. Sebenarnya John Gaventa merumuskan teori *powercube* (kubus kekuasaan) sebagai analisis baru untuk memahami kekuasaan Change, (2009). Secara umum menurut Gaventa kekuasaan mempunyai tiga dimensi:

1. Dimensi *level* (Dimensi Tingkatan), yang terdiri atas: Lokal, Nasional dan Global
2. Dimensi *Space* (Dimensi Ruang), yang terdiri atas: Ruang Tertutup (*closed*), Ruang Yang Diperkenankan (*invited*), dan Ruang Yang Diciptakan atau Diklaim (*claimed/created*)
3. Dimensi *Forms* (Dimensi Bentuk), yang terdiri atas: Bentuk Yang terlihat (*visible*), Bentuk Tersembunyi (*Hidden*), dan Bentuk Tidak Terlihat (*invisible*)

Dalam penelitian ini akan membahas tentang bagian terakhir dari teori Gaventa tentang *powercube* dengan menganalisis dari dimensi ketiga yaitu dimensi *forms*, sebagai bentuk kekuasaan dari politik pemekaran dengan melihat bentuk tersembunyi (*Hidden Power*)

Hidden power dari politik pemekaran akan difokuskan untuk menganalisa politik pemekaran pada beberapa daerah di Nusa Tenggara Timur yang setelah

adanya otonomi daerah mengalami pemekaran wilayah menjadi suatu Daerah Otonomi Baru (DOB). Data terakhir yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Kepala Bagian Tata Pemerintahan Provinsi NTT menjelaskan bahwa:

”Sejak tahun 1999 sampai 2012 sudah terdapat 9 kabupaten baru yang dimekarkan (keterangannya dapat dilihat dalam tabel) dan untuk saat ini masih ada beberapa DOB akan dalam proses pemekaran antara lain Kabupaten Pantar, yang prosesnya sudah sampai pada ke pusat, sedangkan kabupaten Kabupaten Adonara pemekaran dari Kabupaten Flores Timur dan Kota Maumere pemekaran dari Kabupaten Sikka tinggal menunggu hasil”¹.

Berikut adalah data DOB yang terbentuk dari tahun 1999-2012 di Provinsi Nusa Tenggara Timur:

Tabel 1

Daerah Otonomi Baru (DOB) di wilayah NTT dari tahun 1999-2012

No.	Kabupaten Induk	Pemekaran (DOB)	Keterangan waktu
1.	Kabupaten Flores Timur	Kabupaten Lembata	4 Oktober 1999
2.	Kabupaten Kupang	Rote Ndao	10 April 2002
3.	Kabupaten Manggarai	Kabupaten Manggarai Barat	25 Februari 2003
4.	Kabupaten Sumba Barat	Kabupaten Sumba Tengah	2 Januari 2007
5.	Kabupaten Sumba Barat	Kabupaten Sumba Barat Daya	2 Januari 2007

6.	Kabupaten Manggarai	Kabupaten Manggarai Timur,	17 Juli 2007
7.	Kabupaten Kupang	Kabupaten Sabu Raijua	29 Oktober 2008
8.	Kabupaten Belu	Kabupaten Malaka	14 Desember 2012

Sumber: data diolah dari kemendagri

Dari data di atas terlihat jelas bahwa dengan adanya kebijakan otonomi daerah beberapa daerah di Nusa Tenggara Timur juga ikut memekarkan wilayahnya, padahal hasil penelitian jelas menunjukkan bahwa 80% DOB yang terbentuk ternyata dianggap gagal menjadi DOB hanya 20% yang berhasil, namun semangat pemekaran tidak surut dengan hasil yang sebenarnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. (Kompas, 2010)

Politik pemekaran yang dibangun memang sangat kuat, kekuatan politik sudah terbentuk dari tingkat kecamatan oleh individu-individu yang punya kepentingan dalam pemekaran, dengan memobilisasi masyarakat agar dapat terlibat untuk mendukung proses pemekaran. Untuk itu dalam penelitian ini akan menganalisis tentang bagaimana *hidden power* dalam politik pemekaran di Nusa Tenggara Timur. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis tentang kekuatan-kekuatan politik yang tersembunyi yang bermain dalam politik pemekaran yang terjadi di Nusa Tenggara Timur.

B. Literatur Review

Penelitian dengan judul *Komin Tipu Komin: Elite Lokal Dalam Dinamika Otonomi Khusus Dan Pemekaran Daerah di Papua*, oleh I Ngurah Suryawan, 2011. Hasil penelitian menunjukkan bahwa otsus untuk penguatan, perlindungan, dan keberpihakan terhadap orang Papua tertelan perlombaan untuk memperkaya diri, baku tipu (saling tipu) sesama orang Papua untuk memperebutkan gula-gula (uang) otsus yang dihidangkan oleh pemerintah Indonesia. Tentu saja, yang paling pertama dan utama mengakses itu adalah para elite lokal Papua di birokrasi

kemudian menyebar ke seluruh lingkaran elite di kampung-kampung, dewan adat, institusi pendidikan, dan sebagainya.

Penelitian dengan judul *Proliferasi dan Etno-Nasionalisme daripada Pemberdayaan dalam Pemekaran Daerah di Indonesia*, oleh Leo Agustino dan Mohammad Agus Yusoff, (2008). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Perlu dipikirkan kembali mekanisme pentahapan pemekaran daerah Suatu daerah belum bisa menjadi kotamadya sebelum melalui tahapan kota administratif (kotif), Pengajuan proposal pemekaran diubah menjadi satu pintu yaitu melalui pemerintah tidak lagi melalui DPR ataupun DPD, dalam hal ini Depdagri. Daerah terdepan yang bersinggungan dengan Negara tetangga dan daerah kepulauan lainnya,

Dalam pembentukan kawasan khusus bagi daerah seperti ini tidak harus diinisiasi dari daerah tetapi dapat ditetapkan langsung oleh pemerintah pusat untuk memenuhi alasan nasional

Analisis letak perbedaan dengan beberapa penelitian ini adalah terdapat perbedaan pada subjek dan objek penelitian antara lain: fokus penelitian tidak melihat kebijakan pemekaran dari bingkai otonomi khusus dan analisis penelitian fokus pada daerah di Nusa Tenggara Timur.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang bersifat *deskriptif analitis*. Lokasi penelitian di Provinsi Nusa Tenggara Timur (fokus pada Kota Kupang dan Kabupaten Alor), Subjek Penelitian pada *stakeholder* di tingkat Provinsi dan Kabupaten yang mengurus pemekaran. Teknik penentuan informan dengan cara *purposive* dan *snowball*. Teknik analisa data dengan cara reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan

D. Hasil Penelitian

Dengan begitu banyaknya DOB yang terbentuk ternyata tidak serta merta membuat keadaan masyarakat di Nusa Tenggara Timur menjadi lebih sejahtera. Menarik untuk melihat hasil penelitian dari Jacqueline Vel yang meneliti tentang pemekaran Kabupaten Sumba Tengah, yang merupakan pemekaran dari

Kabupaten Sumba Barat pada 2 Januari 2007. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adanya para penguasa lokal dan kekuatan-kekuatan sosial dibalik pemekaran. Penguasa lokal adalah para bangsawan di Sumba (keturunan Raja atau sebagai bangsawan bertanah), karena di Sumba tanah menjadi sumber kekuasaan yang sangat penting. (Henk, 2007).

Berdasarkan analisis yang lebih cermat kita dapat melihat elite lokal mana yang aktif dalam kampanye di Sumba sebenarnya adalah sebuah kelompok kecil. Para peserta yang lebih tua adalah anggota-anggota marjinal dari elite lokal dengan status yang secara tradisional dianggap memadai untuk diterima sebagai pemimpin tetapi dalam posisinya pada pemerintahan atau sektor swasta tidak memuaskan mereka atau yang posisinya menempatkan mereka di luar pembuatan keputusan.

Orang-orang terkemuka ini terdiri dari kepala desa, seorang pendeta yang diskors dari jabatan Gerejanya akibat sejarah panjang konflik-konflik besar maupun kecil dan beberapa pensiunan pegawai negeri sipil. Mereka didukung oleh sekelompok besar anak muda berpendidikan tinggi yang menganggur yang tidak ingin bekerja di pertanian dan mereka memandang kabupaten baru sebagai kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang mereka harapkan. Besarnya pengeluaran dalam biaya kampanye di Sumba mencapai 900 juta rupiah untuk Sumba Tengah, namun fakta menunjuka bahwa Sumba Tengah masih jauh dari harapan tercapainya pelayanan publik yang baik sesuai dengan tujuan pemekaran.

Penulis sendiri telah melakukan penelitian tentang proses pemekaran di Provinsi Nusa tengagara Timur, yang mana dalam proses pembentukan Kabupaten Pantar yang akan menjadi DOB yang terpecah dari Kabupaten Alor, terlihat bahwa kepentingan para elite poltik lokal lebih dominan dalam hal memperebutkan kekuasaan dengan menjual isu pemekaran Kabupaten Pantar. Selain itu ada unsur etnis dalam proses pemekaran, dengan membentuk DOB yang ternyata berdasarkan hasil penelitian tersebut hanya ada kekuatan etnis tertentu yang mengelompokan diri dalam beberapa wilayah untuk

mengintergrasikan kekuasaan dalam mempropagandakan isu pemekaran sebagai jalan terbaik dalam mencapai kesejahteraan masyarakat.

Ada pemetaan politik kekuasaan yang dibentuk dengan menempatkan orang-orang yang ditetapkan sebagai aktor utama dalam mempersiapkan pemekaran, baik di tingkat kecamatan, kabupaten bahkan sampai provinsi berikut adalah *hidden power* yang dibentuk dalam mempersiapkan proses pemekaran. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu panitia pemekaran yaitu di tingkat Provinsi, menjelaskan bahwa:

“Kami sudah membentuk Panitia pemekaran Kabupaten Pantar sebenarnya panitia sudah terbentuk sebanyak 2 kali, awalnya sebelum tahun 2010, dibentuk dengan SK Bupati, diketua oleh salah satu tokoh dari Pantar, setelah itu karena ada beberapa kendala terbentuk lagi panitia yang baru”

Memperkuat penjelasan tersebut senada dengan hasil wawancara dengan panitia pemekaran di tingkat kecamatan dan kabupaten menjelaskan:

“Munculnya gagasan pembentukan kabupaten Pantar lahir saat pelaksanaan Pantar Cup IV tahun 2010. Pantar Cup merupakan acara olahraga sepak bola yang memperebutkan Piala Bupati yang diikuti oleh kecamatan- kecamatan yang ada di kabupaten Alor. Kegiatan ini diadakan di Tamalabang (Kecamatan Pantar), dari hasil acara Pantar cup ini terbesik ide untuk membentuk panitia pemekaran kabupaten pantar. Pertemuan di adakan di gereja Ebenhaezer Pantar, pada 1 Desember 2010”

Panitia yang terbentuk memang didominasi oleh etnis Pantar, yang berasal dari tokoh masyarakat maupun para pemuda yang ada di Kecamatan Pantar. Panitia bekerja dengan gigih agar semua kelengkapan dokumen dapat terkumpul dengan baik. Cara yang ditempuh adalah dengan terus mengadakan pendekatan kepada masyarakat dan melakukan pertemuan-pertemuan dengan masyarakat di Pantar agar dapat mendukung dalam persiapan administrasi DOB. Panitia giat

turun ke setiap desa dan kecamatan untuk melakukan sosialisasi dan mengumpulkan semua perangkat desa dll, agar dapat memberi sumbangsi dalam mengumpulkan tanda tangan persetujuan dari semua Badan Musyawara Desa. Dengan kerja keras yang gigih tersebut akhirnya membuahkan hasil dengan terealisasinya dokumen DOB Pantar.

Panitia juga terus membangun *link* dengan tokoh-tokoh masyarakat yang ada di kabupaten Alor melalui berbagai pertemuan agar semangat perjuangan ini tidak berhenti hanya sampai pada tingkat kecamatan saja.

Ternyata panitia yang sudah terbentuk adalah orang-orang dari etnis suku yang sama sehingga isu pemekaran memang hanya dikuasai oleh kelompok tersebut. Setelah penulis mencaritahu lebih dalam panitia yang lama sempat mengalami pertentangan sehingga dibentuk panitia kedua dengan formasi panitia yang berbeda dari panitia yang pertama.

Selain itu ternyata ada kepentingan partai tertentu dalam mengusung calon yang akan ikut dalam Pemilihan Legislatif di tingkat Provinsi NTT, ada calon anggota dewan yang terlibat aktif dalam pemekaran akhirnya menang dan masuk sebagai anggota DPRD Provinsi NTT dan uniknya tidak hanya di Provinsi saja bahkan di Kabupaten pun ada calon anggota dewan yang duduk di DPRD Kabupaten Alor yang adalah salah satu bagian dari panitia pemekaran Kabupaten Pantar.

Seperti yang dijelaskan dalam teori *powercube* bahwa praktek kekuasaan tertutup tidak hanya pada kekuasaan pemerintah saja namun ada juga pada kekuasaan non-pemerintah, termasuk atau non-government, yang Menurut Gabriel Almon dapat dikategorikan dengan Kelompok kepentingan yang mana dijelaskan Almon bahwa Salah satu struktur yang menyalurkan atau mengartikulasikan kepentingan- kepentingan (Almond, 1966:74). Kelompok kepentingan yang dibangun yaitu panitia pemekaran, orang-orang yang terlibat dalam kepanitiaan yang punya tujuan agar Kabupaten Pantar dapat dimekarkan ternyata juga

mengambil peluang untuk mensosialisasikan diri sebagai bagian dalam bangunan kekuasaan dalam hal ini ikut terlibat dalam kampanye politik sebagai calon legislatif

Para aktor yang memainkan kekuasaan ditingkat lokal juga membangun struktur atau sistem dengan kekuatan politik di DPRD Kabupaten, dalam hal ini DPRD Kabupaten Alor. Sebagai pengambil kebijakan ditingkat kabupaten. Dengan melihat teori kebijakan dalam proses pengambilan keputusan, model kebijakan apa yang digunakan dalam proses pemekaran kabupaten Pantar, sebab hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pengambilan kebijakan di DPRD Kabupaten Alor memakan waktu yang cukup lama. Salah satu faktor yang menjadi kendala karena adanya kepentingan menjelang Pemilihan Legislatif di Kabupaten Alor, selain itu ternyata kekuatan etnis yang terpecah ternyata terjadi antara para anggota dewan di Kabupaten Alor, mayoritas menolak pembentukan Kabupaten Pantar dengan berbagai alasan. Berikut adalah hasil wawancara dengan salah satu anggota DPRD Kabupaten Alor dari Partai Demokrat:

“saya tidak begitu setuju dengan pembentukan Kabupaten Pantar, menjadi DOB karena jika dilihat dari beberapa syarat untuk pembentukan DOB ternyata Pantar belum layak menjadi Kabupaten Baru, hasil study kelayakan bahkan dilakukan sebanyak 2 kali, sebab di awal dilakukan study kelayakan kita tahu bahwa hasilnya sangat tidak memenuhi standar, dari jumlah penduduk yang belum memenuhi syarat, namun saat dilakukan study kelayakan yang kedua ternyata terjadi penambahan jumlah penduduk, padahal rentang waktunya study kelayakan yang dilakukan hanya satu tahun, aneh khan”

Bisa kita amati bahwa, secara administrative beberapa persyaratan memang tidak mendukung pemekaran Pantar, seperti hasil wawancara dengan salah satu anggota dewan yang tidak mendukung karena berlandaskan pada persyaratan administrative, fisik wilayah dan teknis masih jauh dari harapan.

Dapat disimpulkan bahwa terjadi permainan politik oleh pihak-pihak tertentu yang berkepentingan dalam pemekaran. Manipulasi data bisa dilakukan agar kepentingan dapat tercapai. Penulis juga sempat mewawancarai salah seorang pegawai kantor statistik Kabupaten Alor yang tidak mau disebutkan namanya, dia menjelaskan bahwa, banyak manipulasi yang dilakukan dalam pendataan penduduk dan lain-lain karena data yang diambil sebenarnya tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Selanjutnya dengan melihat jumlah penduduk calon kabupaten Pantar sebanyak 43.437 jiwa, maka besarnya skor jumlah penduduk calon kabupaten Pantar sebesar 2,64 atau setara skor 3. Untuk jelasnya berikut adalah hasil penilaian study kelayakan Kabupaten Pantar:

Tabel 2
Rincian Perhitungan skor, Bobot dan Nilai Akhir Indikator

No	FAKTOR DAN INDIKATOR	SKOR	BOBOT	NILAI AKHIR
1	Penduduk			
	1. Jumlah Penduduk	3	15	45
	2. Kepadatan Penduduk	2	5	10
	Sub Total			55
2	Kemampuan Ekonomi			
	1. PDRB Non-Migas Per Kapita	2	5	10
	2. Pertumbuhan Ekonomi			
	5. Kontribusi PDRB Non-Migas	5	5	25
		2	5	10
	Sub Total			45
3	Potensi Daerah			
	6. Bank dan Lembaga Keuangan Non-Bank	4	2	8
	7. Kelompok Pertokoan	5	1	5
	8. Pasar	5	1	5

No	FAKTOR DAN INDIKATOR	SKOR	BOBOT	NILAI AKHIR
	9. Sekolah Dasar	5	1	5
	10. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama	5	1	5
	11. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas	5	1	5
	12. Fasilitas Kesehatan	5	1	5
	13. Tenaga Medis	5	1	5
	14. Kendaraan Bermotor	4	1	4
	15. Kelistrikan	5	1	5
	16. Panjang Jalan	5	1	5
	17. Pekerja SLTA	5	1	5
	18. Pekerja S-1	5	1	5
	19. PNS	2	1	2
Sub Total				69
4	Kemampuan Keuangan			
	20. Jumlah PDS	2	5	10
	21. Ratio PDS terhadap Jumlah Penduduk	4	5	20
	22. Ratio PDS terhadap PDRB Non-Miga	4	5	20
Sub Total				50
5	Sosial Budaya			
	23. Ratio Sarana Peribadahan	3	2	6
	24. Ratio Fasilitas Lapangan Olahraga	5	2	10
	25. Jumlah Balai Pertemuan	4	1	4
Sub Total				20
6	Sosial Politik			
	26. Rasio Penduduk Yang Ikut Pemilu	5	3	15
	27. Jumlah Organisasi Kemasyarakatan	3	2	6
Sub Total				21
7	Luas Daerah			

No	FAKTOR DAN INDIKATOR	SKOR	BOBOT	NILAI AKHIR
	28. Luas Wilayah Keseluruhan	2	2	4
	29. Luas Wilayah Efektif	2	3	6
Sub Total				10
8	Pertahanan			
	30. Rasio Jumlah Personil Aparat Pertahanan	4	3	12
	31. Karakteristik Wilayah Pertahanan	4	2	8
Sub Total				20
9	Keamanan			
	32. Rasio Jumlah Personil Aparat Keamanan	5	5	25
Sub Total				25
10	Tingkat Kesejahteraan Masyarakat			
	33. Indeks Pembangunan Manusia	5	5	25
Sub Total				25
11	Rentang Kendali			
	34. Rata-rata Jarak Kab/kec ke Provinsi	5	2	10
	35. Rata-rata Lama Waktu Perjalanan ke Provinsi	5	3	15
Sub Total				25
Total				365

Sumber : hasil studi kelayakan Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana tahun 2012

Inilah hasil study kelayakan yang sebenarnya bisa dipertanyakan lagi apakah sesuai dengan data di lapangan? karena jika hasil study kelayakan dianggap tidak sesuai maka akan sulit membentuk kabupaten baru, faktanya study kelayakan ini dikatakan sudah valid dan hasilnya sudah digunakan dalam

memproses pemekaran kabupaten Pantar. Hasil study kelayakan ini juga menjadi salah satu faktor mengapa proses pemekaran cukup lama di proses di DPRD Kabupaten Alor. Setelah menunggu hampir 2 tahun, sejak proposal pemekaran diantar ke DPRD Kabupaten Alor, tepatnya pada 12 Januari 2014 akhirnya DPRD Kabupaten Alor memberikan persetujuan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Pantar.

Selama proses pemekaran juga terjadi mutasi jabatan yang dilakukan di lingkungan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), salah satu yang mengalami mutasi yaitu Kepala bagian Tata Pemerintahan. Proses mutasi ini berkaitan juga dengan bagaimana mempersiapkan kelengkapan administrasi dan membangun komunikasi dengan pihak provinsi dan pusat, dalam mempercepat proses pemekaran, sehingga harus ada orang-orang yang bisa diandalkan dalam mempersiapkan proses tersebut. Akhirnya sudah diproses sampai tingkat pusat dan sekarang berhubung adanya moratorium pemekaran, proses pemekaran Kabupaten Pantar masih tertunda, namun dengan melihat proses tersebut maka dapat disimpulkan bahwa tetap saja ada *hidden power* dalam politik Pemekaran yang dimainkan oleh setiap elite yang berkepentingan dalam pemekaran Pantar.

E. Kesimpulan

Kepentingan para elite politik lokal lebih dominan dalam hal memperebutkan kekuasaan dengan menjual isu pemekaran Kabupaten Pantar. Kekuasaan yang tersembunyi tersebut berasal dari kelompok individu yang mendukung pemekaran dengan mengambil keuntungan dari proses tersebut. Selain itu ada unsur etnis dalam proses pemekaran, karena terlihat bahwa terbentuknya panitia didominasi oleh etnis tertentu.

Daftar Pustaka

Buku

- Brodjonegoro, Bambang (ed). (2009). *Sewindu Otonomi Daerah perspektif Ekonomi*. Jakarta: Komite Pemantauna Pelaksanaan Otonomi Daerah.
- Halim, Abd. (2014). *Politik Lokal, Pola Aktor dan Alur Dramatikalnya* (Perspektif Teori *Powercube*, Modal dan Panggung)
- Irtanto. (2008). *Dinamika Politik Lokal, Era Otonomi daerah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Nordholt S. Henk, end Klinken Van Gerry (eds). (2007). *Politik Lokal di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Obor Indonesia
- Robert van Niel. (1984). *Munculnya Elite Modern Indonesia*. Jakarta: Pustaka Jaya
- Romli, Lili. (2007). *Potret Otonomi Daerah dan Wakil Rakyat di Tingkat Lokal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Ratnawati, Tri. (2009). *Pemekaran Daerah, Politik Lokal, dan Beberapa Isu Terseleksi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Syaukani, H. Gaffar Afan dan Rasyid Ryaas. (2009) (cet VI). *Otonomi daerah Dalam Negara Kesatuan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- S.P. Varma. (1987). *Teori Politik Modern*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sugiyono. (2012). *Metode penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R &*. Bandung: ALFABETA

Sumber Internet

- Leo Agustino dan Mohammad Agus Yusoff.(2010). *Politik Lokal Di Indonesia: Dari Otokratik Ke Reformasi Politik*. Jurnal Ilmu Politik, Edisi 21, 2010
http://www.aipipolitik.org/.../3__Politik%20Lokal%20di%20Indonesia__Leo%20A...di unduh pada Kamis 3 Juli 2014.

I Ngurah Suryawan. Komin Tipu Komin: Elite Lokal dalam Dinamika Otonomi Khusus dan Pemekaran Daerah di Papua. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Volume 15, Nomor 2, November 2011 (140-153) <http://www:jurnalsospol.fisipol.ugm.ac.id/index.php/jsp/article/view/23/20>
oleh IN Suryawan – di unduh pada kamis 3 juli 2014

Haryanto. (2009). *Elite Politik Lokal Dalam Perubahan Sistem Politik*. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Volume 13, Nomor 2, November 2009 (131-148)
<http://www:jurnalsospol.fisipol.ugm.ac.id/index.php/jsp/article/view/23/20>
Di unduh pada kamis 3 juli 2014.

Www.kemendagri.ac.id. Di unduh pada 20 juni 2014.

Sumber Media Massa:

Kompas, (Kamis, 15 Juli 2010)